

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang akan ada relevansinya untuk pemecahan masalah yang dikemukakan pada bab pertama.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang akan digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

1. Konsep pemerintahan

Menurut Syafiie (2003:18) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkaitan dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki dua unsur yaitu: (1) ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki kewenangan dan (2) pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Selanjutnya Sudarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah seluruh Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Menurut Mahfud (2001:66) pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam Negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah ditarik sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang dalam mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintah (eksekutif) yang dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Sedangkan azas penyelenggaraan pemerintah di daerah menurut Syafiie (2002:110) adalah:

- a. Azas desentralisasi

Azas desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Azas dekosentrasi

Azaz dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas pembantuan

Tugas pembantuan adalah azaz turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menguasakannya.

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintahkan jasa publik dan layanan civil. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah.

Lebih lanjut Ndara (2003:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil dari setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan. Sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Sedangkan menurut Monsteque dalam Setyawan S (2004:33) pemerintahan adalah seluruh lembaga yang bisa dikenal dengan *namatrias politica* yaitu legislatif (membuat undang-undang).

Pemerintahan menurut Wilson (dalam Syafiie, 2001:23) adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan

angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Devey (dalam Wasistiono, 2006:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyediaan pelayanan
- b. Pengaturan
- c. Pembangunan
- d. Perwakilan
- e. Koordinasi dan Perencanaan

Devey juga mengemukakan pendapat bahwa ada empat fungsi lain dari pemerintahan, yaitu:

- a. Membuat hukum
- b. Menegakkan hukum
- c. Pelayanan publik
- d. Pendorong perubahan social

Sedangkan menurut Stanley (dalam Wasistiono, 2006:53-54) ada tiga kategori utama fungsi pemerintahan yaitu:

- a. Menciptakan landasan fisik dan sosial bagi pembangunan
- b. Menciptakan rencana pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
- c. Menghasilkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang lebih banyak dan efisien.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan dengan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Dari beberapa keterangan tentang pemerintahan di atas ternyata pemerintah juga mempunyai tujuan dari pembentukannya. Labolo (2007:25) menjelaskan tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, membentuk kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

2. Konsep pemerintahan kepenghuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan, maka akan dijelaskan beberapa defenisi yang berhubungan dengan pemerintahan Kepenghuluan.

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kepenghuluan adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu.

Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

3. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan memiliki beberapa defenisi yang dapat dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2006:58-59):

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Parson, Et.Al, 1994).

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur social(Swift dan Levin, 1987).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar kehidupan mampu menguasai (atau berkuasa) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Pemberdayaan menurut Sudarmayanti (dalam Wahdah, 2005:22) adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri harga dirinya sehingga tatanan nilai budaya setempat.

Sedangkan menurut Stewart (dalam Candara, 2006:11) pemberdayaan adalah cara memberi deligasi ketempat dimana kekuasaan yang nyata dapat digunakan secara efektif, delegasi bukan hanya dalam bentuk tugas tetapi juga membuat keputusan serta tanggung jawab penuh.

Masyarakat juga kelompok atau kolektifitas manusia yang melakukan antar hubungan, kurang lebih bersifat tahan lama, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama.Serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu relatif lebih lama.

Selanjutnya defenisi pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (dalam Wahdah, 2005:23) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensial yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Peranan Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sumber: Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000).

Pengurus LPM harus menjalankan tugas pokoknya menurut Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang tugas LPM adalah:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Dari tugas-tugas di atas maka terlihat bahwa pengurus LPM memiliki tugas yang cukup berat, untuk itu tentunya kerjasama yang baik antara sesama

pengurus dengan anggota LPM, dan juga dengan masyarakat setempat yang merupakan objek dari pelaksanaan tugas tersebut terutama dalam pembangunan, agar segala tugas-tugas berat yang diembankan oleh masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan khususnya kepada pengurus LPM tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah membantu Pemerintah Daerah/Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

4. Konsep lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan itu dapat diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antara manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya (Soekanto, 2006:173).

Karena lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi maka Sukardi dan Sunarto (dalam Waridah, 2003:27) mengemukakan istilah organisasi yaitu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Sedangkan organisasi sosial adalah suatu susunan atas struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat.

Organisasi pemerintah menurut Gifford dan Elizabeth (dalam Ndraha, 2003:247) adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, paksaan dan kekerasan yang sah.

Lembagakemasyarakatan adalah suatu organisasi maka Sukardi dan Sunarto mengemukakan istilah organisasi yaitu sebagai satu kesatuan orang-orang yang bersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu sedangkan organisasi sosial adalah sebagai suatu susunan atas struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat (waridah, 2003: 27).

Tujuan dibentuknya lembaga pemerdayaan masyarakat (LPM) adalah membantu pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. suatu organisasi juga memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. baik itu pemerintah pusat atau pun daerah.

Menurut Siagian (2002:242) organisasi perlu memiliki kemampuan merumuskan strategi jangka panjang yang diarahkan, antara lain yaitu pada:

- a. Peningkatan efektifitas kerja
- b. Peningkatan produktifitas organisasi
- c. Pemanfaatan ketangguhan mempertahankan eksistensinya dalam kondisi yang penuh ketidakpastian
- d. Menampilkan dan memelihara keunggulan kompetitif
- e. Ketangguhan menanggapi tuntutan lingkungan yang berubah dengan pesat

- f. Ketangguhan menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang timbul
- g. Mengubah kultur organisasi jika ternyata ia menjadi penghalang bagi terlaksananya perubahan yang diharapkan terjadi.

Sedangkan menurut Waber (dalam Thoha, 2000:98) suatu organisasi mempunyai aspek berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batas-batas tertentu, dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas yang terdapat pada pasal 91 meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasi
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong-royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat (LPM) mempunyai fungsi (Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa) yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
- g. Memberdayakan hak politik masyarakat

Salah satu kegunaan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuh prakarsa serta

menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan. Suatu organisasi juga memiliki hubungan erat dengan pemerintahan. Baik itu pemerintah pusat ataupun daerah.

Otonomi Daerah menempatkan daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan peraturan undang-undang. Sedang daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas daerah tertentu, berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Otonomi Daerah hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari aparatur pemerintah termasuk Pemerintah Daerah sebagai perumus kebijaksanaan pembangunan desa.

5. Konsep peranan

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.”

Menurut ndaraha (2003; 53) peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator setiap jajaran pemerintahan. Menurut siangan (2001;148) menyebabkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai stabilistor.
- b. Sebagai innovator.
- c. Sebagai pelapor.

Sedangkan menurut soekanto (2001;269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Sedangkan menurut Giddens (2004;53) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama.
- b. Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan.
- c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi modifikasi diantara norma-norma.

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada penelitian ini adalah peranan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.

6. Konsep Pembangunan

Pembangunan (development) sering diartikan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, kepada kondisi yang lebih baik menyangkut sikap, pola pikiran, dan kehidupan social ekonomi suatu masyarakat. Pembangunan dapat diartikan suatu usaha merubah pola pikiran, perilaku, dan sikap primitive kearah kemajuan atau modernisasi melalui rekontruksi dan informasi tatanan social, kegiatan pengembangan harus pula berperan sebagai agen pelabuhan (agen of change) yang sipatnya berorientasi pada pelaksanaan dan pemecahan masalah.

Ndraha (1968:1-2) memberikan pengertian pembangunan bertalian dengan ‘ konsep pertumbuhan, rekontruksi, msodernisasi, westernisasi, pertumbuhan social, pembebasan, pemberharuan, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, pengembangan, dan pembinaan.

Menurut siagian (dalam riyadi, 2005:4) mendefikasikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Selanjutnya soekanto (2006:23) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu, antara lain:

- a. Structural, yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan evaluasi terhadap lembaga social, prosedurnya serta pembangunan secara material.
- b. Spiritual, yang mencakup watak dan pendidikan dalam pembangunan cara berpikir secara ilmiah.
- c. Sruktural dan spiritual.

Menurut syakuni (2004:1) pembangunan adalah perbaikan dari suatu situasi-situasi kesituasi lain yang dianggap lebih baik.

Disisi lain dalam pandangan pembangunan ekonomi wilayah (taringan2006,82) menyatakan bahwa pembangunan merupakan penambahan pendapat seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.

Pembangunan buka semata-mata merupakan fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar. Pembangunan haruslah mencakup masalah materi dan financial dalam kehidupan manusia.oleh karena itu pembangunan seharusnya diselidiki sebagai sesuatu proses multidimensional yang melibatkan organisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan social (todaro 2000;25)

Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat merupakan pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan social ekonomi. Sedangkan pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan utama pada perekonomian dan tekanan berikutnya pada keadaan fisik, sehingga merupakan gabungan dari kedua hal diatas tersebut. Pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan. (jayadinata, 1999:42) yaitu: pertama menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian ada lapisan tersebar (dengan pendapatan terkecil) dalam kemasyarakatan. Kedua, memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, menyusun kembali (restructuring) masyarakat dengan maksud supaya timbul pertumbuhan social ekonomi yang kuat.

7. Konsep Partisipatif Pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan dan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. T, R. Battern (seobroto, 2005) menegaskan pembangunan masyarakat desa yang merupakan tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual.

Talidazuhu ndaraha (seobroto, 2005) memberikan beberapa kerita yang terdapat dalam pembangunan masyarakat Desa, yaitu:

- a. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan.
- c. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan.
- d. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara.
- e. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Sedangkan Mely G. Tan dan koentjaraningrat (seobroto, 2005) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat Desa, yaitu:

- a. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat.
- b. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.
- c. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku didalam masyarakat desa.

Selain dengan pemamparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan yang mengetahui secara objektif kebutuhan mereka.

Soetrisno memberikan dua macam defensi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam pembangunan yang direncanakan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau

proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam defenisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa ruang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintahan. Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerja sama yang erat antara perencanaan dan rakyat, dalm merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat, tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka (soetrisno, 2005).

Conyers (2001) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran program pembangunan dan prokyek akan gagal.
2. Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena masyarakat lebih mengetahui selut belut dan merasa memiliki prokyek tersebut.
3. Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatan dipembangunan.

Sedangkan moeljarto (2005) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harda diri dan kemampuan pribadi untuk dapat diturut dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaanya tidak dapat terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk keberhasilan pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan prokyek pembangunan.
6. Ia akan memperluas jangkuan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondisif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pembangunan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara efektifis membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipanjang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk melibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses social; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- b. Keterlibatan dalam memiliki beban dan tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber- sumber pembiayaan pembangunan. Kegiatan yang produktif serasi, dan kepegawasan social atas jalannya pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkat keterlibatannya dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat diwujudkan dengan baik jika sistem pelaksanaan pembangunan kehutanan yang ada melibatkan atau memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. Soetrisno (2005) memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipasif, yaitu:

1. Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2. Poleransi yang besar terhadap krikitik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sipat positif thinking dikalangan aparat pelaksana.

3. Menimbulkan budaya dikalangan pengelola pemerintahan atau pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan didaerah mereka masing-masing dan.
4. Menimbulkan kemampuan untuk merencanakan atas dasar skenario.
5. Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri.

8. Konsep perencanaan partisipasi.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh abe (2002:81) sebagai berikut : “Perencanaan partisipasi adalah perencanaan yang dalam tujuan melibatkan kepengtingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat(baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”.

Hal senada disampaikan oleh wicaksono dan sugiarto (dalam widjaya, 2003:16) “usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang

dihadapi agar menciptakan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri”.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Kemudian wicaksono dan sugiarto (dalam widjaja, 2003:25), lebih lanjut mengemukakan cirri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut.

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
 - a. perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. partisipatoris (keterlibatan) setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. dinamis
 - a. perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
 - b. proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. legalitas
 - a. perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
 - b. menunjukkan etika data nilai masyarakat.
 - c. tidak memberikan peluang bagi penyalunggaan wewenang dan kekuasaan.
5. sinergitas.
 - a. harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
 - c. setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.
 - d. memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder.
6. fasibilitas (realitas) perencanaan harus bersipat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Kemudian menurut Samsura (2003:2) menjelaskan kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut.

- a. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
- b. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
- c. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rumbuk yang pada akhirnya mengarahkan pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement).
- d. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Hal senada juga disampaikan Ade (2005:90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai fungsi positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu:

- a. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelaskan apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Perencanaan partisipatif titik fokus adalah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir dari bawah (bottom up) bukan lahir di atas (top-down) atau pemerintah daerah jadi perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (bottom up) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintahan daerah.

9. Konsep Perencanaan, Komunikasi Pemerintahan.

Fianten dan norma (1991) tipologi perencanaan dibagi atas empat macam yang dasarnya pada pemikiran teoritis, empat macam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tradisional planning (perencanaan tradisional). Pada jenis perencanaan ini perencanaan menetapkan maksud dan tujuan untuk merubah semua sistem kota yang telah rusak. Biayanya pada konsep perencanaan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota. Pada perencanaan tradisional memiliki program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standar an metode yang professional.
- b. User oriented planning (perencanaan yang berorientasi pada pengguna konsep perencanaan ini adalah membuat perencanaan yang tujuan untuk mengkomendasi pengguna dari produk perencanaan tersebut. Dalam hal ini masyarakat kota. Masyarakat yang menentukan produk perencanaan harus melibatkan dalam setiap proses.
- c. Advocacy planning (perencanaan advokasi). Pada perencanaan ini berisikan proses pembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakat miskin kota. Pada perencanaan advokasi akan memberikan perhatian khusus terhadap melalui program khusus guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
- d. Incremental planning (perencanaan dukungan). pada perencanaan yang bersifat dukungan terhadap proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan perkotaan.

Menurut Glasson dalam buku tarigan (2005) menyebutkan tipe-tipe perencanaan terdiri dari; physical planning and economic planning, allocative and innovative planning multi or single objective planning dan indicative or imperative planning.

Selanjutnya menurut tarigan (2005) di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom up planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain yang pada giliran akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan komunikasi pemerintahan ndaraha (2003:469) menjelaskan komunikasi pemerintahan sebagai berikut :

“ proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan frame of reffence pihak yang lain, pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap pihak lain terbentuk, berubah pada atau terpelihara berdasarkan kesaling pengertian dan kesaling percayaan antara kedua belah pihak”

Selanjutnya ndaraha (2003:231) menjelaskan bahwa proses komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperan lambing-lambang yang mengandung arti dari satu kepada pihak lain unsure-unsure yang terlibat sekaligus sebagai dimensi demensi sproses kosmsunikasi pemerintahan meliputi:

1. Komunikator (communicator) yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan.
2. Pesan (messege)z yaitu idea, informasis, opini, dan sebagainya.
3. Saluran (channel, media) ialah alat dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan.
4. Komunikasi (audience), yaitu orang yang menerima pesan.
5. Effek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikasi unsure-unsure komunikasi tersebut diatas selalu dijumpai dalam kegiatan komunikasi. Karena unsure tersebut tidak bisa diabaikan dalam membahas komunikasi, atau

dengan kata lain menjadikan komunikasi itu efektif. Adan pun keberhasilan proses komunikasi antar pemerintah dengan yang diperintah, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pesan, yang menurut schramm (dalam effendi, 2002:13) mengatakan bahwa : komunikasi akan berhasil apabila pesan disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of refence) yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experience and meaning). Yang pernah diperoleh komunikasi. Dengan kata lain dalam proses komssunsikasi, komunikasi akan berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikasi.

Komunikasi disusul dengan pesan agar informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat komunikator harus memiliki kecermataan dalam memilih kata- kata yang tepat dalam merumuskan pesan itu penting dan menentukan agar ide-ide gagasan yang ada itu dapat dituangkan kedalam lembaga- lembaga yang bisa dimergerti oleh penerima, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Informasi yang disampaikan kepada komunikasi harus secara jelas dan tepat mudah dimengertikan, sebab daya tangkap setiap komunikasi adalah berbeda-beda.

10. Konsep Pelaksanakan Tugas

Siagian (2005; 126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian moekizat (2000;12) menyatakan bahwa melaksanakan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai. Menurut lowler dan porter dalam as'ad (2001;47), bahwa:

1. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapainya oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Menurut moekijat (1998:11) tugas adalah suatu bagian atau suatu unsure atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsure (elemen atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Untuk menunjukkan suatu tujuan atau target. Maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “ laksana” yang berarti bantuan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran-an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan” pengertian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilaksanakan oleh the liang gie et. Lebih lanjut bintoro tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa

pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

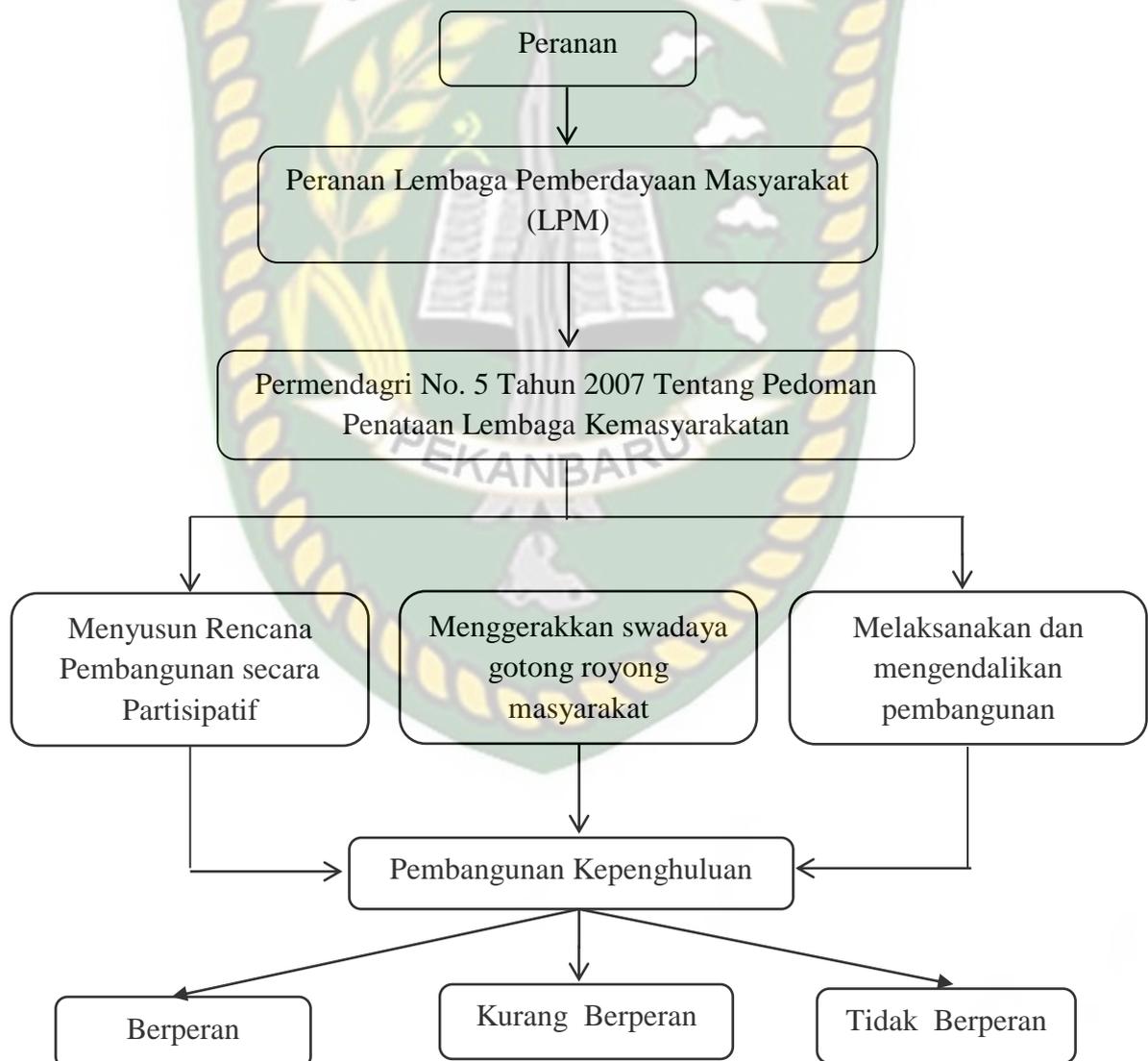
2. Lembaga administrasi negara republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi keinginan dan usaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Wiestara, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.
4. Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
5. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dann memecah kan masalah yang dihadapi

sehubungan dengan penelitian ini dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori yang dianggap relevan.

Gambar II.I: Kerangka Pikiran Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber: Modifikasi Penelitian tahun 2017

C. Konsep Operasional

Untuk memperjelas atau menghindari kesalahpahaman beberapa konsep atau istilah pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut :

1. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu
3. Lembaga kemasyarakatan adalah kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta dalam memberdayakan masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
5. Pembangunan adalah suatu proses untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

6. Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang bertempat tinggal di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
8. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah prilaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dalam hal ini, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
9. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dalam penelitian ini adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan Sekeladi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan
10. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong masyarakat dalam penelitian ini adalah penumbuh kembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan lembaga pemberdayaan masyarakat Sekeladi.
11. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam penelitian ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan Sekeladi melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.\

12. Pengendalian lingkungan adalah pengawasan atas kondisi fisik keadaan dan sumber daya alam.

D. Operasional Variabel

TABEL II.1: Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Pengukuran 5
Tugas adalah sesuatu yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan (Sutan Rajasa, 2003:593)	Tugas Lembaga Pemberdayaan masyarakat (permendagri (No 5 Tahun 2007)	1.Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif	a. Usulan dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh LPM	Baik Kurang Baik Tidak Baik
			b. Inisiatif untuk menggali aspirasi masyarakat datang dari pengurus LPM	
			c. Usulan dan saran ataupun aspirasi yang digali oleh anggota LPM disalurkan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan perencanaan pembangunan	
		2.Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat	a. Keikutsertaan pengurus LPM dalam melaksanakan gotong-royong	Baik Kurang Baik Tidak Baik
			b. Menjalankan kegiatan gotong-royong	
			c. Mengajak dalam kegiatan gotong-royong	

	3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	a. Memajukan pembangunan di Kepenghuluan	Baik
		b. Membina kerja sama antar lembaga masyarakat untuk pembangunan	Kurang Baik
		c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan manfaat pembangunan	Tidak Baik

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2017

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur variabel penelitian tentang pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dikatakan:

Berperan :Bila ketiga tugas indikator yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sudah dilakukan atau tanggapan responden terhadap tiga indikator berada pada persentase > 67-100%.

Kurang berperan :Bila ketiga tugas indikator yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tidak dilakukan atau tanggapan responden terhadap ketiga indikator pada persentase 34-66%.

Tidak berperan :Bila ketiga tugas indikator yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tidak dilakukan atau tanggapan responden terhadap ketiga indikator pada persentase < 34%.

A. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $> 67-100\%$.

Kurang Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $34-66\%$.

Tidak Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $< 34\%$.

B. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat

Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $> 67-100\%$.

Kurang berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $34-66\%$.

Tidak Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $< 34\%$.

C. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $> 67-100\%$.

Kurang Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $34-66\%$.

Tidak Berperan :Bila tanggapan responden terhadap ketiga sub indikator berada pada persentase $< 34\%$.